



Buletin

# Parlementaria

Nomor 962/I/VI/2017 • Juni 2017



**Perlu Terobosan pada Industri Perbukuan**

**Pemberantasan Terorisme Harus Libatkan Tiga Unsur**

# **Pimpinan Pansus RUU Sisnas Iptek Terbentuk**

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto bersama Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Marlinda Irwanti

## Pimpinan Pansus RUU Sisnas Iptek Terbentuk

Pimpinan Pansus RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) akhirnya terbentuk. Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto menetapkan langsung Pimpinan Pansus RUU ini saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi VII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

**P**impinan Pansus RUU Sisnas Iptek terdiri dari Ketua Daryatmo Mardiyanto (F-PDI Perjuangan) dan didampingi tiga wakil ketua. Mereka adalah Marlinda Irwanti (F-PG), Anita Jacoba Gah (F-PD), dan Andi Yuliani Paris (F-PAN). Sebelumnya, Agus sempat memimpin lobi dari semua anggota yang hadir. Pansus ini melibatkan dua komisi, yaitu Komisi X dan Komisi VII.

“RUU ini padat dengan teknologi. Kami berharap, ini bisa berjalan lancar, sehingga sesuai dengan agenda Prolegnas. Terbentuknya pimpinan dengan cepat juga mudah-mudahan bisa melaksanakan pembahasan sesegera mungkin,” komentar Agus usai memimpin rapat.

Keterlibatan dua komisi dalam pembahasan RUU ini, karena dua komisi inilah yang sangat berkepentingan dan bersentuhan langsung dengan isu-isu produk teknologi dan lembaga pendidikannya. RUU ini, kelak akan membenahi produk-produk riset sekaligus membenahan lembaga pendidikan tingginya.

Sementara itu usai ditetapkan sebagai Pimpinan Pansus RUU Sisnas Iptek, Marlinda menyatakan, hasil-hasil riset ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) harus jadi kekuatan bangsa. Dari Iptek-lah, bangsa ini bisa mensejahterakan rakyat sekaligus mampu mengaplikasikannya untuk kepentingan rakyat.

“Iptek kelak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Selama ini, Iptek belum menjadi keunggulan dan pondasi dalam membangun bangsa,” katanya.

“Harapan kita dengan pembahasan RUU ini, Iptek akan menjadi kekuatan bangsa. Iptek juga harus jadi salah satu landasan ketika pembangunan nasional akan dijalankan,” ujar politisi Partai Golkar itu lagi.

Di negara-negara lain, Iptek menjadi kekuatan nasional negaranya. Dan Indonesia selama ini, belum sepenuhnya menjadikan produk-produk Iptek sebagai landasan pembangunan dan mudah diaplikasikan masyarakat.

Kelak, dengan RUU ini, lembaga-lembaga pendidikan tinggi juga menjadi keniscayaan untuk dibenahi. Semua sisi yang terkait dengan Iptek pasti dibenahi. “Sekarang perguruan tinggi banyak, tapi aplikasinya ke masyarakat masih kurang. Padahal, dana riset cukup besar di Kemenristekdikti,” ungkap politisi dari Jateng X ini. ■

(mh/isc) Foto: Ojje/hr



# Parlemen Sepakat TNI Ikut Tanggulangi Terorisme

Wacana memasukkan TNI dalam menanggulangi pemberantasan terorisme disambut baik parlemen, baik DPR, DPD, maupun MPR. Kesepakatan ini terungkap saat Ketua DPR RI bertemu dengan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara.

**K**etua DPR RI Setya Novanto, mengungkapkan, apa yang disarankan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, dibicarakan kembali saat semua pemimpin lembaga negara bertemu kembali di Istana, Selasa (30/5). Isu terorisme jadi salah satu perbincangan menarik.

"Ini sebetulnya sudah lama dibicarakan. Kita akan laksanakan bersama. Terorisme ancaman yang harus kita hadapi bersama. DPR, DPD, dan MPR sama-sama kompak melaksanakan ini. Semakin cepat semakin baik. Masuknya TNI untuk ikut menanggulangi terorisme sudah dibicarakan secara teknis. Mudah-

mudahan tidak ada masalah lagi," ungkap Novanto usai pertemuan kepada pers.

DPR sendiri, kata Novanto, sudah memberi perhatian khusus atas masalah ini. Dua kekuatan, TNI dan Polri, memang dibutuhkan sebagai penumpas aksi terorisme yang selama ini menghantui masyarakat di tanah air. Menko Polhukam hadir pula dalam pertemuan tersebut. "Tadi kita diskusikan juga dengan Pak Wiranto dan Pimpinan DPR, MPR, DPD. Ini akan kita tindak lanjuti segera. Pimpinan Komisi I dan III agar melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya," ucap Novanto. ■

(mh/sco), Foto : Jaka/hr.



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Pimpinan MPR dan DPD

**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**  
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra  
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias

**FOTOGRAFER**  
Rizka Arinindy, Supardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief  
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadillah

**ADMINISTRASI FOTO**  
Bagus Mudjiharjanto

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi S. Kom

**DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Pesta Evaria Simbolon, S.E, M.Si (Kasubag Distribusi)

**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Mujiono

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Remon, Yuliana Puspita,  
Ifan, Siti Rondiyah, Oji Saputra  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Ketua DPR RI, Setya Novanto

## Bom Kampung Melayu Jangan Dikaitkan Dengan Sentimen Keagamaan

Ketua DPR RI Setya Novanto mengutuk aksi teror bom yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ia minta aksi teror seperti ini tidak dikait-kaitkan dengan sentimen keagamaan, karena tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan dan memganjurkan kekerasan, apalagi aksi keji dan biadab.

Sebagaimana diketahui, Rabu malam (24/5) sekitar pukul 21.00 WIB terjadi dua ledakan bom di Terminal Kampung Melayu. Ledakan yang diduga bom bunuh diri ini menewaskan tiga anggota Polri dan dua orang yang diduga pelaku bom bunuh diri, serta 10 orang polisi dan warga sipil luka-luka.

"Kejadian ini bukan hanya menjadi ancaman bagi warga ibukota, tetapi ancaman bagi kita semua, rakyat Indonesia. Tentu saja kita semua tidak bisa menerima alasan apapun dibalik perilaku brutal dan keji ini. Siapapun dibalik kejadian ini, mereka adalah penebar teror bagi warga serta ingin mengacaukan situasi dan kondisi Indonesia yang aman, tentram dan damai," katanya dalam rilis yang disampaikan kepada Parleментарia, Kamis pagi (25/5).

Menurutnya, kejadian ini menunjukkan bahwasanya keberadaan mereka memang ada dan dapat muncul setiap saat sehingga kita perlu waspada berbagai potensi yang mengarah pada hal tersebut. Kita perlu meningkatkan dukungan yang penuh kepada petugas keamanan untuk bekerja dalam rangka menjaga keamanan dari segala potensi ancaman.

"Saya meminta aksi teror seperti ini untuk tidak dikait-kaitkan dengan sentimen keagamaan, karena tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan dan memganjurkan kekerasan, apalagi aksi keji dan biadab seperti kejadian pilu malam tadi. Agama selalu mengajarkan tentang kehidupan yang baik, aman dan damai," tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menghimbau kepada seluruh rakyat

Indonesia khususnya warga ibukota untuk tidak panik, jangan takut dan jangan terprovokasi, rapatkan barisan dan bersama-sama menjaga situasi dan kondisi khususnya di ibukota, agar tetap kondusif. "Kita percayakan penanganan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya, saya yakin mereka mampu mengusut kasus teror ini," imbuh Pimpinan Dewan dari dapil NTT ini.

Kepada para pelaku atau kelompok penebar teror yang tidak bertanggung jawab, ia minta untuk menghentikan seluruh aksi-aksi teror seperti ini. "Kembali saya ingatkan dan tegaskan bahwa aksi keji dan biadab seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diajarkan oleh agama apapun," mantapnya.

"Saya sangat sedih dan ikut merasakan duka, apalagi korban yang meninggal adalah anggota Polri, para prajurit terbaik yang kita tahu selalu menjadi garda terdepan menjalankan tugas mulia, menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Semoga para korban mendapatkan tempat layak disisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi cobaan ini," paparnya.

Ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia, warga negara dan anak bangsa di manapun berada untuk selalu bekerja sama dengan pihak keamanan jika menengarai adanya potensi-potensi yang bisa menimbulkan keresahan ataupun mengganggu keamanan. ■

(sc), foto: iwan alfar

## OTT KPK Dramatis dan Menyedihkan

Terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat petang lalu (26/5) terhadap beberapa orang yang diduga melakukan suap, diantaranya seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT), dinilai menyedihkan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang Agus Hermanto menyatakan hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini sesuatu yang sangat dramatis dan menyedihkan. Karena ini merupakan kejahatan yang sangat berat dan harus diusut tuntas.

"Ini sesuatu hal yang sangat fenomenal, bayangkan saja penilaian dari prestasi kinerja suatu kementerian yang nantinya akan berguna untuk langkah-langkah selanjutnya dimanipulasi dalam arti disuap. Ini sesuatu yang betul-betul sangat dramatis

# Fahri Hamzah Kunjungi Mapolres Jakarta Timur

Dari hasil peninjauan, Fahri menilai seluruh tahanan dalam kondisi baik. Selain itu, Fahri juga menjenguk dua tahanan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), salah satunya auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri yang dituduh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah kunjungi Mapolres Jakarta Timur.

“Saya tadi di atas melihat para tahanan secara umum baik. Tadi juga ada dua tahanan Tipikor, ada Pak Rahmat dan Pak Rochmadi yang terkait kasus kemarin BPK,” kata Fahri usai meninjau tahanan.

Sebagaimana diketahui, Rochmadi Saptogiri merupakan salah satu dari 4 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra itu menjelaskan kondisi kesehatan Rochmadi

saat ini baik-baik saja. Menurutnya, selama di ruang tahanan, Rochmadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah.

“Beliau juga sehat, shalat terus. Beliau juga shalat sunah dalam suasana puasa beliau hanya bilang shalat dan membaca Alquran. Dan sambil menenangkan jiwa,” tutur politisi asal dapil NTB itu.

Rochmadi ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/5) lalu. Selain Rochmadi, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus suap WTP yakni Ali Sadli (Auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan

Sugito (Irjen Kemendes PDTT).

Dalam kasus ini, Rochmadi diduga menjadi penerima suap. Perantara penerima suap adalah Ali Sadli. Sedangkan perantara pemberinya diduga Jarot Budi Prabowo, dengan tersangka pemberi utamanya adalah Sugito.

Suap diberikan terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut *commitment fee* dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu. ■

(sifsc) foto: dok-pr/itr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Agus Hermanto

dan sangat menyedihkan. Ini merupakan kejahatan yang sangat berat dan tentunya ini harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya, kalau perlu siapa aktor intelektualnya harus betul-betul bisa

dipegang dengan baik,” kata Agus kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Menurutnya, berita tersebut membuat kita semua kaget. Pasalnya, Kementerian Desa PDTT melakukan transaksi bahkan suap. Ini sebuah pelajaran bagi kita dan hal ini harus diberantas. Politisi dapil Jawa Tengah ini, memberikan apresiasi kepada KPK dan mengucapkan terima kasih telah mengungkap kasus ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kinerja dari kementerian mendapat penilaian dari BPK. Penilaian pertama yang tertinggi dan terbaik adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), kemudian wajar dengan pengecualian (WDP) dan yang terakhir adalah *disclaimer*. Penilaian yang dilakukan BPK ini penting karena digunakan untuk pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan bagi

perencanaan-perencanaan selanjutnya dari suatu kementerian.

“Nah sekarang kalau memang dia belum sampai kepada penilaian wajar tanpa pengecualian dan dijadikan predikat wajar tanpa pengecualian, ini akan menjadi hal-hal yang merusak daripada program daripada seluruhnya terutama dari program pemerintah melalui Kementerian Keuangan karena hal ini akan terjadi untuk pengajuan anggaran perencanaan-perencanaan selanjutnya,” jelasnya.

“Prestasi ini akan diikutkan manakala misalnya suatu kementerian *disclaimer* pasti didalam anggarannya akan banyak dibatasi. Tapi manakala WTP tentunya dia akan memberikan kelonggaran-kelonggaran didalam rencana kegiatan kementerriannya,” tambahnya mengakhiri. ■

(sc) Foto : arief/itr

# Perlu Terobosan pada Industri Perbukuan



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon bersama Ketua Umum IKAPI Rosidayati Rozalina

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon mengatakan, perlu ada terobosan pada industri perbukuan, khususnya buku konvensional atau buku cetak. Sehingga akan memudahkan penerbit buku yang memproduksi buku, maupun bagi masyarakat yang ingin mendapatkan buku.

“Meskipun sudah ada e-book dan *digital book*, peran dari buku cetakan masih sangat besar. Sehingga perlu ada beberapa terobosan,” kata Fadli saat menerima perwakilan pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Di sisi yang sama, politisi F-Gerindra itu memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya PT Pos Indonesia yang telah memberikan fasilitas pengiriman buku ke sejumlah daerah. Hal ini sebagai salah satu cara menghadapi tantangan terhadap distribusi perbukuan.

Fadli pun berharap, Undang-Undang Sistem Perbukuan (UU

Sisbuk) yang telah disahkan DPR pada akhir April lalu, dapat meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Kegiatan seputar perbukuan pun diharapkan dapat meningkatkan upaya itu.

“Kami berharap melalui berbagai pameran buku, bedah buku, maupun diskusi buku dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap buku, dan meningkatkan literasi kita,” imbuh Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun mengapresiasi peran Ikapi yang menghimpun banyak penerbit di seluruh Indonesia, dan menjalankan peran penting dan garda terdepan dalam persoalan literasi.

Sementara itu, Ketua Umum Ikapi Pusat Rosidayati Rozalina mengungkapkan rasa

Kami berharap melalui berbagai pameran buku, bedah buku, maupun diskusi buku dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap buku

gembiranya atas lahirnya UU Sisbuk. Menurutnya, dengan adanya UU ini, dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan buku, khususnya buku pendidikan.

“Tapi fokus dari UU ini masih banyak pada buku pendidikan. Untuk menggairahkan kembali industri penerbitan buku, kita harus melakukan banyak hal. Seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi, perlu ada terobosan-terobosan,” kata Ida.

Ida menjelaskan, saat ini industri buku masih menemui banyak kendala. Misalnya terkait distribusi, pajak yang dipungut hingga empat lapis dalam satu buku, kertas yang seringkali hilang dari peredaran saat dibutuhkan, hingga harga buku dan kertas yang tidak terkendali.

“Banyak yang harus kita lakukan. Termasuk merinci beberapa hal dalam implementasi UU Sisbuk, dan disesuaikan dengan praktek di Indonesia. Kami akan mengawal proses tindak lanjut dari lahirnya UU Sisbuk. Termasuk pemberian masukan pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri,” jelas Ida. ■

(sf)/Foto:Rumi/hr

## Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon Terima Dubes Venezuela

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Duta Besar Venezuela Gladys Francisca Urbaneja Duran di Ruang Kerjanya Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5). Fadli menjelaskan tujuan kedatangan Gladys untuk menyampaikan perkembangan situasi di Venezuela terkait dinamika politik yang mengkhawatirkan dunia belakangan ini.

“Dinamika demonstrasi saat ini sangat tinggi. Atas kejadian itu mereka ingin negara-negara sahabat Venezuela salah satunya Indonesia mengetahui perkembangan tersebut. Tapi, dijelaskan kejadian di sana masih dalam koridor demokrasi. Sehingga mereka (Venezuela) berharap tidak ada intervensi dari negara lain,” jelas Fadli.

Mereka berharap adanya pengertian dari dunia internasional, untuk tidak mengintervensi, sebab lanjut politisi F-Gerindra itu, mereka (Venezuela) yakin dapat menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan konstitusi yang dimiliki.

“Atas kejadian itu, bulan Juli mendatang akan diselenggarakan pemilihan umum,” ungkapnya.

Aksi demonstrasi yang terjadi pada 1 April 2017 itu bermula dari anjloknya harga minyak yang membuat perekonomian Venezuela anjlok. Warga Venezuela telah bertahun-tahun bertahan hidup dalam kondisi kekurangan bahan pangan dan obat-obatan. Harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya meroket tinggi, mengikis gaji dan nilai mata uang Bolivar. Bahkan, krisis ekonomi semakin parah sehingga terjadinya demonstrasi yang mengakibatkan beberapa warganya meninggal dunia. ■

(ria/mp), Foto : Kresno/hr



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon menerima Duta Besar Venezuela

# Indonesia Dukung Penuh Filipina Tumpas ISIS

Ketua DPR RI Setya Novanto memastikan Indonesia mendukung penuh upaya Filipina untuk menumpas habis ISIS, karena terorisme adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa dan negara di dunia.

**S**ebagaimana diketahui, saat ini kelompok teroris ISIS tengah membangun kekuatan di Asia Tenggara, dengan menguasai Kota Marawi, Kepulauan Mindanao, Filipina Selatan, yang berbatasan langsung dengan negara kita, Provinsi Sulawesi Utara.

“Saya pastikan Indonesia mendukung penuh upaya negara Filipina untuk menumpas habis ISIS, karena terorisme adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa dan negara di dunia,” katanya dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen, Senin (29/5).

Terlebih lagi, lanjut politisi Partai Golkar ini, aksi teror bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa hari lalu, adalah aksi keji dan biadab ISIS yang tidak berperikemanusiaan dan diluar akal sehat, serta sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan.

“Atas dasar itulah, saya menghimbau agar aksi sadis para terorisme ini tidak dikait-kaitkan dengan sentimen keagamaan, karena agama apapun selalu mengarahkan umatnya pada kehidupan yang damai dan harmonis, sesuai dengan prinsip dan nilai keagamaan yang senantiasa menjadikan kedamaian dan toleransi sebagai tujuan hidup bersama di dunia ini,” paparnya.

Kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah, tegas Setnov demikian sapaan akrabnya. Kekerasan, lanjutnya, tak pernah jadi pilihan sebuah agama untuk menjalankan ajaran dan mencapai misinya. “Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya terorisme tidak memiliki agama,” tegas anggota dewan



Ketua DPR RI, Setya Novanto

*Saya pastikan Indonesia mendukung penuh upaya negara Filipina untuk menumpas habis ISIS, karena terorisme adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa dan negara di dunia*

dari dapil NTT tersebut.

Lebih lanjut, Setnov menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak takut dan tidak akan bisa ditakut-takuti dengan

aksi terorisme seperti ini, apalagi aparat keamanan dalam hal ini Polri, TNI, BIN, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), semakin siaga dan waspada 24 jam.

“Mereka seolah tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, 24 jam dalam sehari, selalu waspada, menjaga keamanan dan memberikan rasa aman, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hati,” ungkapnya.

“Saya sudah berbicara dan mendengar langsung keterangan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius yang memastikan BNPT, yang didalamnya terdapat unsur TNI dan Polri serta beberapa elemen lainnya, apalagi didukung penuh rakyat Indonesia, siap melindungi seluruh bangsa dan negara ini dari ancaman terorisme,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPR ini mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan langkah-langkah antisipasi masuknya ISIS dan ancaman lainnya ke wilayah Indonesia melalui daerah perbatasan, salah satunya dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sangat baik, kokoh dan lengkap serta didalamnya terdapat Pos Pamantas TNI dan Polri.

Terakhir, ia mengingatkan bahwasanya terorisme adalah kejahatan luar biasa, Extra Ordinary Crime, butuh penanganan khusus dan ekstra serta bantuan dan perhatian kita semua, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, agar terorisme dapat dibumi hanguskan hingga keakar-akarnya dari dunia ini. ■





Suasana rapat Pansus Pemilu dengan Mendagri, Menkumham dan Wamenkeu

## Pansus Tolak Usulan Capres dan Cawapres Tunggal

Rapat panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama pemerintah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, pansus sepakat menolak munculnya calon presiden tunggal dalam pemilu presiden.

**R**apat tentang pengambilan keputusan 15 isu krusial ini dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Wamenkeu Mardiasmo beserta jajaran nya.

“Kami setuju dengan pemerintah untuk menambahkan dua ayat dalam RUU Pemilu agar proses pemilu memberikan tahapan panjang supaya terhindar dari calon tunggal,” ujar Ketua Pansus Lukman Edy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu malam (24/5).

Namun, sambung Lukman, apabila

selama pendaftaran tidak ada calon lain maka proses tahapan pemilu akan tetap terus berlanjut. Sebaliknya, bilamana ada parpol yang memenuhi syarat untuk mengajukan capres dan cawapresnya, tapi tidak menggunakan haknya maka akan diberikan sanksi.

“Kalau parpol yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan capres tapi dia tidak mengajukan maka kena sanksi tidak ikut pemilu presiden lima tahun berikutnya,” jelas Politisi dari F-PKB ini.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh fraksi juga menyepakati iklan kampanye

dengan mengutamakan lembaga penyiaran publik yang difasilitasi penyelenggara pemilu yang dapat didanai oleh APBN sesuai dengan ketentuan perundangan. Pansus juga sepakat debat pasangan calon difasilitasi KPU dan dapat didanai APBN.

Sementara itu, terkait dana saksi pemilu partai politik yang dibiayai oleh negara, Pansus menunda pembahasan tersebut. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan dari Fraksi DPR. Mayoritas Fraksi menyetujui dengan alasan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan saat melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Sementara beberapa fraksi menolak karena dinilai membebankan APBN.

Selanjutnya, pansus akan melanjutkan rapat pada hari Senin terkait pembahasan penataan dapil (jumlah kursi anggota DPR, jumlah kursi setiap dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap dapil anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan 3 isu krusial lainnya. ■

(ann/isc), Foto : Azka/hr



Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto berjabat tangan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani

## Pembangunan Antar Daerah Harus Merata

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah di antar daerah harus merata, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PDI Perjuangan sepakat bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran. Upaya untuk mengurangi kesenjangan harus dilanjutkan,” ujarnya saat menyampaikan tanggapan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2018 pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Selasa (30/5).

Selain Fraksi PDI Perjuangan, kesembilan Fraksi lainnya juga menyampaikan pandangannya. Fraksi

PG, Fraksi Gerindra, Fraksi PD, Fraksi PAN, Fraksi PKB, PKS, PPP, Nasdem dan Fraksi Hanura.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta APBN harus dimanfaatkan secara baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga pengeluaran yang tidak produktif agar dapat dikurangi. “Pengelolaan anggaran negara harus dimanfaatkan sebagai momentum pemacu pertumbuhan ekonomi daerah agar pembangunannya merata. Pembangunan proyek infrastruktur di luar Pulau Jawa

harus dipercepat,” tandas Adisatrya.

Anggota FPG Sarmuji mengharapkan postur APBN 2018 lebih berfokus pada pembangunan yang menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Walaupun ada optimisme dalam pemulihan perekonomian global, tetapi masih terdapat tantangan perekonomian domestik yaitu masalah kemiskinan dan kesenjangan,” ujarnya.

Fraksi ini menegaskan, pihaknya mendorong agar pemerintah dapat bekerja lebih keras dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 5,4 hingga 6,1 %. “Fraksi Golkar mendorong pemerintah

untuk melakukan terobosan dalam menciptakan pertumbuhan berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,” ujar Sarmuji.

Sedangkan Fraksi PKS melalui anggotanya Rofi’ Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif stagnan. Hal ini terlihat dari asumsi harga minyak mentah yang masih konservatif pada kisaran 45 – 60 dollar AS per barel dan angka lifting minyak 771 ribu – 815 ribu bph (barel per hari) seperti tahun lalu.

“Terkait asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran 45-60 dolar AS per barel. Fraksi PKS berpendapat bahwa ICP pada tahun 2018 akan masih fluktuatif disebabkan oleh pengaruh *supply and demand* dan juga geopolitik di beberapa negara penghasil minyak,” jelas Rofi’ ■

(ns.mp), Foto: Iwan Armanias/hr



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis

## Usut Tuntas Kasus Penerbitan Alquran tanpa Surah Al-Maidah 51-57

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyesalkan hilangnya Surat Al-Maidah ayat 51-57 dalam sebuah Mushaf Al-Quran, terbitan PT Suara Agung.

Menurutnya, kasus ini harus ditelusuri secara tuntas, meskipun pihak percetakan dalam hal ini PT. Suara Agung, telah meminta maaf dan mengaku khilaf.

"Harus diselidiki apakah murni khilaf, atau ada faktor lain, karena kelalaian ini menimbulkan masalah serius, agar tidak terulang lagi di masa datang," katanya dalam rilis yang disampaikan kepada Parlemen, Minggu (28/5).

Menurut Politisi PKS itu, apapun alasannya, kekhilafan tersebut terkait dengan kitab suci yang dianggap suci oleh umat Islam. Sehingga perlu kehati-hatian dalam memproduksi Al Quran.

"Ini menyangkut Al Quran yang dianggap suci, Jadi, jangan satu ayat, satu huruf saja hilang, itu sangat fatal karena sudah pasti merubah makna. Jadi harus hati-hati dalam memproduksi Al Quran," tegasnya.

Disamping itu, kata Iskan, masalah tersebut juga membuktikan kurang profesionalnya percetakan karena seharusnya yang dicetak adalah yang sudah ditashih/dicek kesohihannya oleh Tim Pentashih Alqur'an

"Kementerian agama yang *leading* tupoksinya terkait Agama sudah seharusnya memperkuat proses pengawasan terhadap Al Quran yang beredar di masyarakat," pungkasnya. ■

(sc), Foto : Jaka mugraha/hr

## BPJS Kesehatan Terancam *Collaps*

Menyusul anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit dari tahun ke tahun, maka lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini terancam *collaps*. Tren pengelolaan keuangannya selalu negatif.



Anggota Komisi IX DPR RI, Andi Fauziah Pujiwati Hatta

Anggota Komisi IX DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta mengomentari hal tersebut sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/5). Menurut Ichi, begitu ia akrab disapa, defisit ini bisa jadi bom waktu dan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat. Seperti diketahui,

BPJS mengalami defisit mencapai Rp 6,23 triliun pada 2015. Sementara pada 2016 sekitar Rp 8,6 triliun. Bahkan, pada 2018 diprediksi defisitnya mencapai Rp 10,05 triliun.

"Negara menambal dana yang tersedia di DJS (dana jaminan sosial). Seperti bom waktu, pada



saatnya nanti dana di DJS tidak mencukupi lagi untuk menambal defisit yang ada," kata Ichi.

Ketika negara, lanjut politisi Golkar itu, tak lagi memberi bantuan, barulah akan terlihat BPJS Kesehatan kewalahan membiayai kebutuhan layanan kesehatan. Pemerintah diimbau segera memberi perhatian pada persoalan defisit tersebut. "Kalau tidak segera dilakukan antisipasi yang menyeluruh, BPJS bisa *collaps* dalam perjalanan mencapai *Universal Health Coverage* (UHC)," tutup Ichi. ■

(mh/sc), Foto: Andri/hr

# Bencana Banjir Sultra Diharapkan Tidak Terulang

Komisi V DPR RI menginginkan bencana banjir bandang tidak lagi terjadi lagi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga ke depannya bukan hanya normalisasi sungai yang harus dilakukan dalam rangka mencegah banjir itu, tetapi harus ada penanganan yang serius terhadap sedimentasi yang terjadi di wilayah Teluk Kendari.



Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Sulawesi Tenggara dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena



**W**akil Ketua Komisi V Michael Wattimena, saat memimpin Kunjungan Spesifik dalam rangka peninjauan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Tenggara, mengatakan bahwa ini yang harus disikapi pemerintah pusat dalam hal menyangkut dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Komisi V hadir di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melihat sejauhmana problematika yang dihadapi, dan apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita, karena Daerah Aliran Sungai (DAS) itu adalah masuk di dalam wilayah sungai yang menjadi penanganan pembiayaan APBN”, kata Michael, usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Ali, di Kota Kendari, Senin (29/5).

Dijelaskan, bahwa pembangunan *drainase* merupakan bagian dari tupoksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Dengan adanya Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Balai pada pasal 65 dijelaskan bahwa drainase itu juga menjadi tanggung jawab dan pembiayaan APBN.

Ke depan diharapkan, dengan identifikasi yang terjadi di area kota ataupun area kabupaten yang menimbulkan banjir akibat drainase, dapat ditangani dengan baik.

“Masalah banjir bukan saja terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat dari curah hujan yang begitu tinggi, dan juga faktor-faktor yang lainnya. Itu memang menjadi penyebab banjir yang dialami pada wilayah Republik Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Ali menjelaskan, kaitan dengan banjir bandang di Kota Kendari, ada beberapa faktor yang harus disikapi. Tidak saja pada satu sektoral tetapi harus melibatkan pemangku kepentingan yang lainnya, karena ini ada lintas sektoral dalam rangka penanganannya.

Sebagaimana dikatakan Nur Ali, terjadinya banjir karena sedimentasi yang cukup banyak di Teluk Kendari, curah hujan yang sangat tinggi dan juga akibat dari berubahnya alih fungsi hutan yang menjadi pertanian atau perkebunan.

“Akibatnya, tidak ada lagi daerah serapan, sehingga memudahkan terjadinya banjir di Kota Kendari,” ia menambahkan. ■

(as/mp), Foto : Agung s/hr



<http://regional.kompas.com/read/2017/05/14/21142381/gubernur.sultra.tetapkan.siaga.satu.bencana.banjir>

# Patut Dipertimbangkan Keterlibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme

Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme patut dipertimbangkan. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta TNI diberi kewenangan dalam penanganan terorisme.

“Pemerintah sejak awal telah memberikan perhatian khusus dengan melibatkan TNI dalam penanganan terorisme seperti terlihat dalam Pasal 43b RUU PTPT, namun persoalan ini masih *debatable* karena peran TNI dikhawatirkan justru menegasikan sistem peradilan pidana yang berjalan selama ini,” ungkap Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Lebih dari itu, Nasir melihat sekian rangkaian kejadian ledakan bom dan aksi teror yang tak pernah tuntas diberantas selama ini menunjukkan adanya kelemahan Polri dalam hal ini Densus 88 dalam menangani aksi teror di Indonesia.

“Publik mulai jenuh melihat aksi teror yang terus muncul dan tidak terselesaikan, ditambah lagi dengan drama salah tangkap yang kerap dilakukan Densus 88 bahkan kejadian *extra judicial killing* yang tak pernah bisa dipertanggung jawabkan,” ungkap Nasir.

Untuk itu Nasir melihat, peran penanganan terorisme tentu sudah tidak bisa lagi jika hanya dilakukan oleh Polri saja, modus kejahatan dan jaringan yang berkembang sampai di level keamanan nasional mutlak akan berimbas pada pertahanan negara ke depan.

“Teror yang dihadapi saat ini bukan tidak mungkin akan berimbas pada pertahanan nasional, apalagi untuk mengungkap sel-sel tidur yang dikhawatirkan Indonesia akan mengalami kejadian seperti yang terjadi di Kota Marawi Filipina, sehingga peran intelejen dan TNI perlu dilibatkan” ungkap Nasir.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah mempelajari pola penanganan terorisme yang terjadi di beberapa negara salah satunya di Inggris.

“Saat tim Pansus melakukan kunjungan kerja ke Inggris, kami melihat keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme itu sudah lazim dilakukan oleh negara berkembang, namun hal ini tergantung dengan

peningkatan eskalasi ancaman di negara tersebut,” ujar Nasir.

Untuk itu Nasir berpendapat, selama ini Indonesia belum mempunyai penilaian terhadap tingkatan eskalasi tersebut, misalnya seperti suatu situasi tanggap bencana, ada tingkat merah, kuning, hijau dan biru.

“Bisa jadi TNI dilibatkan pada tingkat eskalasi merah atau kuning yakni situasi darurat yang berpotensi teroris akan terjadi sewaktu-waktu dan mengancam pertahanan negara,” kata Nasir.

Ke depan Nasir berharap, garis komando keterlibatan TNI terlibat dalam



Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil

penanganan terorisme bisa dilakukan melalui Menkopolkam atau dengan memperkuat BNPT.

“Koordinasi BNPT masih lemah, penentuan eskalasi dan keterlibatan TNI bisa ditarik ke atas yakni Menkopolkam,” pungkasnya. ■

(sc), Foto: Arief/hr

## Pemerintah Didesak Gelar Operasi Pasar Hadapi Lonjakan Harga

Persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri seolah menjadi tradisi yang selalu terjadi setiap tahun. Penyebab fluktuasi harga bahan pangan yang terjadi jelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya bersumber pada *supply and demand* saja, melainkan banyak aspek. Persoalan distribusi seperti rantai pemasaran yang panjang, peran tengkulak, tata niaga yang buruk, dan banyak faktor lainnya menjadi kendala yang belum terselesaikan.



# Komisi V DPR RI Dalam Fakta Terbakarnya KM Mutiara Sentosa I

Musibah terbakarnya Kapal Motor Mutiara Sentosa I di perairan Masalembu, Sumenep, Jawa Timur beberapa waktu lalu, mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI.

**M**enurut Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis setidaknya ada empat fakta yang dilakukan pendalaman oleh anggota Dewan saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur terkait musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa I itu.

"Fakta pertama yakni tentang simpang siurnya masalah data jumlah penumpang yang tercatat di manifes dengan jumlah korban yang dievakuasi oleh Basarnas. Meskipun kami sudah mendapat penjelasan akan hal itu, tetapi kami akan mengecek lebih dalam lagi, apakah benar data-data tersebut. Karena pada laporan awalnya ada perbedaan selisih jumlah yakni sekitar 26 orang yang belum dimasukkan dalam manifes," papar Fary usai melakukan pertemuan dengan Syahbandar, Kementerian Perhubungan Laut, Basarnas, KNKT, BMKG dan pihak asuransi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (29/5).

Fakta kedua, lanjut Fary, Komisi V mendapatkan informasi dari BMKG bahwa kondisi cuaca pada saat itu dalam kondisi yang normal.

Sedangkan fakta ketiga adalah musibah kebakaran yang terjadi itu menurut pihak KNKT diakibatkan karena ada muatan yang berisi bahan berbahaya. Oleh karenanya hal itu akan kita dalam, mengapa muatan tersebut bisa lolos dan siapa yang bertanggungjawab atas masalah itu," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Komisi V DPR juga mendapatkan penjelasan khusus yang berkaitan dengan masalah asuransi, baik asuransi jiwa maupun kendaraan.

"Dipastikan asuransi itu diberikan sesuai dengan kewenangan dan hak dari penumpang kapal maupun yang memiliki barang. Kita akan adakan rapat dengar pendapat lagi di DPR untuk mendalami beberapa temuan-temuan yang kita dapatkan," pungkasnya. ■



Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis

**M**elihat kompleksnya persoalan yang kerap terjadi itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hamdhani mengatakan bahwa tradisi kenaikan harga kebutuhan pangan pokok jelang lebaran di Indonesia, dilihat dari sisi hukum ekonomi, yakni dimana semakin banyak permintaan terhadap suatu barang maka pasti berdampak pada harga mengalami kenaikan.

"Pada tahun ini yang kami lihat di pasaran, harga-harga yang naik itu terjadi pada komoditas bawang putih, daging, ayam potong, serta beberapa hasil produksi tanaman hortikultura. Ini menandakan bahwa setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kenaikan harga itu seperti sudah menjadi kebiasaan. Oleh karena itulah kita mendesak kepada pemerintah supaya melakukan operasi pasar seperti yang pernah dilakukan Bulog pada masa sebelumnya, sebagai salah satu langkah antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga pangan saat Ramadhan dan Idul Fitri," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/5).

Politisi F-Nasdem itu juga menyatakan, saat ini masih banyak impor komoditas pangan yang dilakukan pemerintah seperti daging dan sebagainya. Oleh karena itu kedepannya harus juga disiasati dalam hal untuk mengatasi adanya spekulasi-spekulasi yang bermain di bidang komoditas pangan.

"Kami akan melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga kebutuhan pangan pokok tersebut dengan melihat langsung ke lapangan," tegasnya. ■

(dep/so), Foto : Kresno/hr



Anggota Komisi IV DPR RI, Hamdhani

# Komisi IV DPR RI Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat, fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

“Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan, yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah, kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak, harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu,” ujar Edhy didampingi anggota Komisi IV lainnya saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Menurut Edhy, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuap kebutuhan bawang

putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk budidaya bawang putih. “Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian,” sambung politisi dari F-Gerindra ini.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. “Negara sudah memberikan ijin impor Rp 500 ribu ton, tapi kok harga bawang putih tidak mampu kita atur,” kritisinya.

Untuk mengatasi fenomena lonjaknya

harga bawang ini, ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan, jika perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

“Sekarang ini ekonomi kartel sehingga hanya pihak tertentu yang menikmati dan ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Pemerintah harus berani bertindak karena keterbatasan kami banyak. DPR hanya bisa melakukan pengawasan tidak mengeksekusi,” sambung politisi dari dapil Sumsel ini.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu, pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini. Hanya saja, mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP) harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih. ■

(ann/sc) Foto : Anne/hr



Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat





Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis AlMasyhari menerima Parlemen China

## Komisi I DPR RI dan Parlemen China Bahas Keamanan Siber

Komisi I DPR RI dipimpin Ketuaanya Abdul Kharis AlMasyhari pada Selasa (23/5) menerima kunjungan delegasi Parlemen China membahas *cyber security* (pengamanan siber). Masalah ini sedang menjadi isu prioritas di Komisi I DPR.

**M**enurut Kharis, DPR RI melihat dua hal terkait keamanan siber ini. Pertama bagaimana membuat UU untuk bisa ditindaklanjuti sebab eksekutif tidak mungkin berjalan atau melakukan eksekusi apapun kecuali ada UUnya. Ada beberapa UU yang sudah eksis, seperti UU Transaksi Elektronik, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Keterbukaan Publik. Juga sedang disiapkan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU untuk merespon begitu cepatnya kejahatan siber. Sedangkan terkait kelembagaannya seperti Badan Siber Nasional, baru persiapan pembentukannya.

Anggota Komisi I Andreas Hugo Pariera mempertanyakan pengamanan siber di China sebab diperoleh informasi bahwa negara itu sudah ada sistem pengamanan

yang sangat baik. Dia menanyakan pula sistem pengamanan apakah terpusat atau dalam beberapa institusi.

Menanggapi hal itu, Ketua delegasi Parlemen China Chen Xiurong mengatakan, sekarang internet atau industri informasi kemajuannya sangat pesat dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus memikirkan bagaimana mendorong perkembangan industri informasi serta dikelola dan diatur sehingga bisa berkembang ke arah yang positif dan sehat.

Menurutnya, sekarang kejahatan siber cukup sering terjadi termasuk serangan hacker yang baru saja terjadi mengakibatkan kelumpuhan internet di beberapa negara. Termasuk juga kebocoran informasi pribadi mengakibatkan masalah yang sangat

besar bagi kehidupan sehari-hari.

Tak terkecuali, lanjut Chen, kejahatan terorisme bisa disebar lewat internet. Maka dari itu dalam kunjungan ini, ia ingin mengetahui langkah-langkah apa yang diambil pemerintah Indonesia menjaga keamanan siber supaya kita bisa saling belajar dan juga langkah legislasi apa yang dilakukan DPR.

Ditambahkan Chen, sebelumnya pengamanan siber di China tersebar di beberapa instansi pemerintah dan kini penuh pengelolaan dan pengaturan secara terpusat. Untuk makin meningkatkan keamanan siber, China membentuk satgas atau tim dengan koordinasi tingkat tinggi langsung dipimpin Presiden.

Pada bulan Desember 2012 lalu, dikeluarkan keputusan untuk meningkatkan perlindungan terhadap informasi pribadi dan pada Nopmeber 2016 sudah ditetapkan UU Keamanan Siber. Bulan Desember 2017 mendatang, jelas Chen, direncanakan akan dilakukan pengawasan dan peninjauan terhadap implementasi UU Keamanan Siber tersebut.

Ikut mendampingi Abdul Kharis dan Andreas H. Pariera, Pimpinan dan Anggota Komisi I Asril Tanjung, Supiadin Aris Saputra, Sukamta dan Nurdin Tampubolon. ■

(mp), Foto : Jaka/hr



Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin

## Pemberantasan Terorisme Harus Libatkan Tiga Unsur

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB. Hasanuddin menegaskan, dalam pemberantasan terorisme setidaknya melibatkan tiga unsur utama. Ketiganya adalah penegakan hukum, keterlibatan seluruh komponen intelijen, dan militer.

daerah-daerah khusus, seperti di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kedutaan besar, dan termasuk ancaman yang ditujukan langsung kepada Presiden, Wakil Presiden, Tamu Kepala Negara, itu menjadi tanggung jawab TNI.

Hasanuddin pun yakin, keterlibatan TNI tidak akan tumpang tindih dengan institusi lain. Karena menurutnya sebelum ada penindakan, koordinasi terus dilakukan. Namun dalam unsur penyidikan, itu menjadi sepenuhnya kewenangan Kepolisian, dengan dibantu informasi-

informasi intelijen dari TNI, BIN dan lainnya.

"Misalnya teroris akan ditindak di suatu wilayah, itu wilayahnya TNI. Kalau di ZEE atau di laut lepas yang memiliki kemampuan itu TNI AL. Menurut hemat saya tidak perlu ada *overlapping* atau ada rebutan wilayah. Itu sudah *clear*," imbuh politisi asal Jember Jawa Barat itu. ■

(sif.mp), Foto:Arnel/hr

**D**emikian dikatakannya ketika ditanya media terkait keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme, sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Hal ini juga terkait revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Semua itu dikompilasikan lalu diambil tergantung kepada bagaimana keputusan politik negara itu. Jadi dikompilasi, siapa yang di depan, siapa yang di belakang," imbuhs Hasanuddin.

Politisi F-PDI Perjuangan itu mencontohkan terorisme di Marawi, Filipina, yang cukup menjadi sorotan. Menurutnya dalam konteks penegakan hukum, tentara Filipina dilibatkan untuk melakukan pengepungan dan penyerangan. Bahkan Angkatan Udara dan Angkatan Darat juga dikerahkan.

"Proses-proses seperti itu di Indonesia, tentu harus melibatkan penegakan hukum, intelijen, dan kemudian militer. Kalau berbicara penegakan hukum, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, tentu TNI memberikan banyak informasi," yakin Hasanuddin.

Pada tahap penindakan, mantan Sekretaris Militer Presiden itu pun yakin TNI punya kemampuan. Misalnya di

## Jelang Pemilihan DK OJK Komisi XI DPR RI Himpun Aspirasi Asosiasi Perbankan

Dalam waktu dekat, Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK). Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan, pihaknya saat ini tengah meminta masukan dari *stakeholder* lembaga keuangan seperti asosiasi perbankan hingga para pakar sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) para calon anggota DK-OJK. "*Fit and proper test* DK-OJK akan berlangsung pada awal Juni," ujar Soepriyatno pada Rabu, (24/5).

**D**alam rangka menjelang pemilihan DK-OJK ini, Komisi XI meminta masukan dari Perbanas. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia). Sehingga diharapkan akan memperoleh masukan dalam pertimbangan nantinya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam kesempatan tersebut berharap akan mendapatkan masukan yang lebih spesifik agar nanti

# Tata Kelola Keuangan Kemenpora Minta Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta dengan tegas kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan tata kelola keuangannya. Mengingat, Kemenpora merupakan satu dari enam kementerian/lembaga yang mendapatkan opini *disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat dari BPK RI.

**H**al tersebut diungkapkannya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Iman Nahrawi yang mengagendakan pembahasan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

“Kita mendesak Kemenpora agar segera melakukan perbaikan tata kelola keuangan sehingga dimasa yang akan datang, semua mitra Komisi X bisa mendapatkan opini WTP,” ungkap politisi F-Gerindra ini.

Disisi lain, dia juga mengimbau Kemenpora secepatnya menindaklanjuti temuan BPK tersebut. “Atau bila

perlu menyampaikan kekurangan-kekurangan laporan terhadap BPK,” paparnya.

Sebelumnya, Menpora Iman Nahrawi mengatakan beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi opini BPK dikarenakan pengelolaan aset oleh pihak ketiga. Misalnya, fasilitas TAFISA ke-6 World Sport For All Games 2016 melalui FORMI dan fasilitasi persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 melalui INASGOC.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno

mampu mendapatkan hasil DK-OJK yang kredibel. “Hari ini kita ingin minta masukan terkait proses dari panel itu sendiri. Kita berharap itu diisi oleh orang yang berkompeten,” ujar Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan pendapat dari ketiga lembaga tersebut mengenai jumlah 6 dari 7 DK-OJK tidak masuk kriteria

yang dihasilkan panel. “Kita ingin dapat masukan yang spesifik. Kalau Perbanas bilang hasil panel cukup mewakili, namun yang jadi pertanyaan beberapa kalangan, enam dari tujuh orang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tidak masuk kriteria yang dihasilkan panel,” ujar Heri.

Selain itu nantinya Komisi XI dijadwalkan akan meminta masukan calon anggota DK-OJK pada industri pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan asosiasi dari pasar modal seperti emiten, profesi pasar modal, perusahaan efek, konsultan hukum pasar modal dan dana pensiun pada 29 Mei 2017. Sebagaimana diketahui, Komisi XI dijadwalkan akan menjalankan proses *fit and proper test* calon anggota DK-OJK dari 5 Juni hingga 8 Juni. ■

(hs/sc), Foto: Ojjiel/hr

Selain itu, sambungnya, pengelolaan aset tetap Kemenpora belum memadai yang terdiri dari koding penomoran atas inventarisasi barang. Diketahui, TA 2015 peralatan dan mesin senilai Rp 14,2 miliar dan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya senilai Rp 20,7 miliar. Dari hasil laporan keuangan Kementerian Pemuda dan olahraga Tahun 2016 atas Sistem Pengendalian Intern. Total temuan berjumlah 8 temuan dan total rekomendasi 20 rekomendasi.

Sementara, pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 atas kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan total temuan 16 temuan. Nilai temuan sebesar Rp 144 miliar. Sementara, total rekomendasi 60 rekomendasi dengan nilai rekomendasi sebesar Rp110 miliar. ■

(ann/sc), Foto: Arie/hr



Tim Kunjungan Kerja Spesifik memantau maraknya peredaran Narkoba Jenis G dan Karnoven di Kalimantan Selatan

## Komisi III DPR RI Fokus Pencegahan Peredaran Narkoba di Kalsel

Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Daerah juga Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan melakukan tindakan preventif atas adanya peredaran narkoba jenis G dan Karnoven di Kalimantan Selatan.



[http://jambiupdate.co/foto\\_berita/2015/12/11/28ilustrasi-narkoba.jpg](http://jambiupdate.co/foto_berita/2015/12/11/28ilustrasi-narkoba.jpg)

Hal tersebut mengemuka saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan terkait pengawasan atas maraknya peredaran narkoba jenis baru yang sedang gencar beredar di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (26/5).

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang juga berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan

menjelaskan, peredaran narkoba jenis Zeneta atau obat jenis G dan Karnoven itu semakin besar, dan sudah berulang kali terjadi.

“Sudah sekian kali peningkatan-peningkatan ini berlanjut diawali dulu di Amontai dengan 1,5 juta sekarang 4 juta Zeneta lewat mobil Fuso yang diatasi atau dialihkan dengan diletakkan di bawah sayur dan di bawah makanan-makanan. Bukan main-main ini,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Alhabsyi ingin adanya koordinasi yang sinergi antar instansi terkait demi terwujudnya Kalimantan Selatan yang bebas narkoba.

“Dan alhamdulillah kita telah memberikan pengawasan dan memberi masukan yang tajam sehingga kita dengar kelemahan-kelemahannya sehingga kita akan *follow up* ke Pemerintah Pusat.” tutur Alhabsyi.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan, dari paparan yang ada dari pihak Polda, BNNP, Kajati, dan Kanwil Kalimantan Selatan bahwasanya kondisi Kalimantan Selatan atas narkoba tergolong cukup parah, ditambah tingkat pengedar yang semakin naik secara signifikan.

Oleh karenanya, kata Desmond, membutuhkan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah masuknya narkoba ke Kalimantan Selatan. “Pengakuan Kapolda, Kejaksaan dan BNN dan contoh yang ada hari ini penindakan maksimal tapi pencegahan belum maksimal. Ini diakui dengan jujur. Kenapa penindakan maksimal, *Over Capacity* kan dari narkoba mayoritas kok tumbuh terus, berarti pencegahannya belum maksimal,” tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.

Turut serta dalam kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Masinton Pasaribu, Risa Mariska (F-PDIP), Adies Kadir, Ahmad Zacky Siradj (F-PG), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Daeng Muhammad (F-PAN), Bahrudin Nasori (F-PKB), Aboe Bakar Alhabsyi (F-PKS). ■

(ndy/mp), Foto: Naedfa/hr

## DPR RI dan Pemerintah Sepakat Bahas RUU Jabatan Hakim

DPR RI bersama pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. Direncanakan pembahasan akan dimulai pada awal Juni 2017.

“Kita sepakati kemungkinan besar rapat setelah tanggal 6 Juni, baru akan rapat Panja RUU Jabatan Hakim,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan saat memimpin rapat kerja antara Komisi III dengan pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/5).

Dalam kesempatan ini, pemerintah diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan Kementerian Keuangan.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menerangkan, pada tingkatan Panja akan dibahas secara dalam terkait setiap substansi pasal-pasal yang termaktub pada rancangan perundangan ini.

“DIM berjumlah 389, setelah penyisiran sebanyak 205 DIM tetap, redaksional 45 DIM, substansi 109 DIM, substansi baru 27 DIM, dan jumlah DIM yang bersifat mohon penjelasan sebanyak 3 DIM,” imbuh politisi asal dapil Sumut itu.

Sebelumnya, Trimedya juga menjelaskan beberapa poin krusial dalam RUU yang menjadi usul inisiatif DPR ini. Diantaranya, menambahkan Hakim Militer dalam ruang lingkup Jabatan Hakim. Berikutnya, mengubah pengaturan pendelegasian mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim dari yang semula diatur oleh Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kemudian, Hak Hakim yang diberikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan hakim di lingkungan peradilan dan kemampuan keuangan negara, menambahkan KY sebagai lembaga yang akan bersama-sama dengan MA melakukan uji kompetensi dan kelayakan dan menentukan lulus atau tidaknya calon hakim tinggi, dan beberapa poin lainnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, pemerintah menyambut baik usulan RUU Jabatan Hakim. Menurutnya, selama ini, jabatan hakim belum diatur secara komprehensif.

“Hakim merupakan pejabat negara yang perlu menjaga integritas dan profesionalitas. Jabatan hakim perlu diatur dalam undang-undang. Secara prinsip, pemerintah sependapat dengan undang-undang ini,” jelas Yasonna.

Agar menghasilkan undang-undang yang komprehensif, Yasonna menyampaikan tiga poin pokok yang harus dicermati dalam pembahasan RUU. Pertama, RUU Jabatan Hakim harus memperhatikan penentuan status dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. “Selama ini, kedudukan hakim sebagai pejabat negara masih berpola sebagai PNS (pegawai negeri sipil), ucapnya.

Kedua, dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, beberapa materi sudah diputus berdasarkan Putusan MK Nomor 43, yang membatalkan norma seleksi hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketiga, RUU Jabatan Hakim harus memperhatikan lingkup kewenangan lembaga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tercantum secara tegas mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta peran masing-masing warga negara. ■



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan

(sl/mp), Foto: Jaka/hr

# Sekjen DPR RI Lepas Pensiun Pegawai DPR RI

Sekjen DPR RI Achmad Djuned mengucapkan selamat kepada A. Santoso Hardjo N, Salimun dan Suyanto yang telah mengabdikan diri di Kesekretariatan DPR RI selama lebih dari tiga puluh tahun. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara pelepasan Pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa purna, di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5).

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Santoso, Pak Salimun dan Pak Suyanto yang tepat pada hari ini sudah resmi dinyatakan lulus dari PNS (pegawai negeri sipil) DPR RI,” ujar Sekjen DPR RI Achmad Djuned diiringi tawa.

Ketiganya, lanjut Djuned, sudah lebih dari tiga puluh tahun mengabdikan dan berkarya di Setjen DPR RI. Santoso misalnya, mengabdikan menjadi PNS di Setjen DPR RI selama 35 tahun lebih tiga bulan, Salimun selama 37 tahun mengabdikan di Setjen DPR RI, sedangkan Suyanto mengabdikan di Kesekretariatan DPR RI selama 34 tahun lebih tiga bulan.

Ketiganya tidak pernah mendapatkan hukuman indisipliner dari Kepegawaian, baik ringan, sedang, apalagi berat. Tidak hanya itu, ketiganya pun sempat mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari negara. Hal itu menurut Djuned dapat menjadi contoh bagi teman-teman, junior dan seluruh pegawai Setjen dan Badan Keahlian (BK) DPR RI untuk berbuat serupa. Atas pengabdianya tersebut tidak lupa, Djuned mengucapkan terimakasih.

Sementara itu, A. Santoso Hardjo N, mewakili pegawai yang telah memasuki masa purna bakti dalam acara tersebut juga mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya baik atas kesempatan mengabdikan di Setjen DPR RI, dan acara pelepasan pensiunan ini.

“Saya tidak menyangka ada acara pelepasan seperti ini. Ini merupakan penghormatan bagi kami yang telah memasuki masa pensiun. Di sini saya juga mengucapkan mohon maaf jika selama ini ada kekurangan dan kesalahan baik dalam bekerja, maupun sikap saya dalam keseharian. Untuk segala kesempatan saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Sekjen dan seluruh pejabat di Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR RI,” ungkap Santoso.

Pada kesempatan itu juga hadir Ketua P3S (persatuan pensiunan pegawai setjen) DPR RI, Toip Heryanto. Dikatakannya, pelepasan ini sebagai bentuk penghormatan kepada P3S yang notabene hingga hari ini telah memiliki anggota sebanyak 800 orang.

“P3S ini dibentuk sebagai wadah untuk tetap menjalin tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan kita sebagai pensiun pegawai DPR RI. Jumlah kami hingga saat ini sebanyak 800 orang. P3S tidak pernah ada moratorium dalam perekrutan anggota, sehingga dari tahun ke tahun jumlah kami terus bertambah. Walaupun tidak dapat dipungkiri hampir

setiap bulan juga ada yang keluar dari P3S karena meninggal,” papar Toip.

Ditambahkan Toip pensiunan bukan berarti sebuah kematian. Di masa pensiun banyak hal yang masih bisa diperbuat, baik itu membuat sebuah usaha, ataupun dengan mengikuti pertemuan P3S secara berkala. Diajang ini kita bisa saling tukar informasi atau sekedar bersenda gurau. Dengan demikian akan menghambat kepikunan.

Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Badan Keahlian DPR RI, Johnson Rajagukguk, Inspektur utama (Irtama) Setyanta Nugraha, Deputi persidangan Damayanti dan beberapa pejabat, serta perwakilan dari Dharma Wanita DPR RI. ■

(ayu/isc), Foto: Jayadi/hr.



Sekjen DPR RI, Achmad Djuned



Pimpinan DPR RI melantik dua anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019 dalam Rapat Paripurna ke-26.

## Pimpinan DPR RI Lantik Pengganti Sohibul dan Tantowi

Pimpinan DPR RI melantik dua anggota Pergganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014 - 2019 dalam Rapat Paripurna ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 - 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

**D**alam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Pimpinan DPR melantik Toriq Hidayat yang menggantikan Sohibul Iman dari F-PKS daerah pemilihan Jawa Barat XI dan Ivan Doly Gultom menggantikan Tantowi Yahya dari F-Golongan Karya daerah pemilihan DKI Jakarta III.

Pengucapan sumpah/janji kedua anggota PAW Toriq Hidayat dan Doly Gultom dipandu langsung Ketua DPR RI Setya Novanto. "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ucap Novanto diikuti kedua anggota Dewan yang dilantik tersebut.

Setelah pengucapan sumpah selesai, Pimpinan DPR secara bergantian memberikan ucapan selamat kepada kedua anggota Dewan PAW periode 2014-2019 tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap dengan bergabungnya dua anggota PAW tersebut dapat memperkuat kinerja DPR. "Semoga dengan bergabungnya saudara

dapat memperkuat fungsional kinerja DPR," tuturnya.

Seperti diketahui, Sohibul Iman mengundurkan diri dari anggota DPR karena ingin fokus sebagai Presiden PKS. Semetara, Tantowi mengundurkan diri dari anggota Komisi I DPR karena terpilih menjadi Dubes Selandia Baru. ■

(ria.mp)/foto: iwan armanias/iv



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon menerima Mahasiswa Magister Agribisnis IPB, Selasa (30/5/2017).  
Foto: Arief/hr

Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informasi dipimpin Wakil Ketua Komisi I Meutya Viafa Hafid, Rabu (31/5/2017).  
Foto: Azka/hr



Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan bersama Anggota Tim lainnya meninjau lokasi Sentra Bawang Nasional di Brebes, Jawa Tengah Selatan, (30/5/2017) Foto: Runi/hr